



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jl. SUMATERA No. 42 SURABAYA 60281
Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5014755, 5036995, 5036960
Web / Email : www.pt-surabaya.go.id / ptsurabaya@gmail.com

Nomor : 2196/KPT.W14-U/OT1.6/IV/2026

Surabaya, 16 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran: 2 berkas

Hal : Hasil penilaian kinerja pada Pengadilan
Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi
Surabaya Tahun 2026

Yth. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana terlampir
Di

Tempat

Menindak lanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa satuan kerja sebagaimana daftar dalam lampiran I telah dinyatakan lulus seleksi oleh tim penilai Pengadilan Tinggi Surabaya, yang akan diusulkan dalam penilaian kinerja Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2026;
2. Agar satuan kerja sebagaimana daftar dalam lampiran I segera melengkapi persyaratan pengusulan sebagaimana lampiran II paling lambat tanggal 20 April 2026 dengan mengupload dokumen dukung pada Link <https://bit.ly/4mpxnuR> ;
3. Untuk penilaian pelaksanaan layanan hukum bagi Masyarakat kurang mampu (Posbakum, Sidang di luar gedung Pengadilan dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)) dilaksanakan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
4. Pengadilan Negeri yang diusulkan wajib menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Kesesuaian dan Kebenaran Data dan Informasi yang disampaikan dalam dalam Penilaian Kinerja (Format samakan dengan SPTJM Zona Integritas dengan tujuan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,



Sujatmiko

Lampiran I

Surat Hasil penilaian kinerja pada Pengadilan Negeri di
wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2026

Nomor : 2196/KPT.W14-U/OT1.6/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR SATUAN KERJA YANG DIKIRIMI SURAT

1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus;
2. Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA;
3. Pengadilan Negeri Malang Kelas IA;
4. Pengadilan Negeri Jombang Kelas IA;
5. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;
6. Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA;
7. Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB;
8. Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB;
9. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;
10. Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB;
11. Pengadilan Negeri Kab. Madiun kelas IB;
12. Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II;
13. Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.

Lampiran II
 Surat Hasil penilaian kinerja pada Pengadilan Negeri di
 wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2026
 Nomor : 2196/KPT.W14-U/OT1.6/IV/2026
 Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR USULAN PENILAIAN KINERJA BADILUM TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA			
No.	Jenis Penilaian Kinerja	Satker yang diusulkan	Dokumen yang harus dilengkapi
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Pengadilan Negeri Malang Kelas IA 2. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA 3. Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA 4. Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Pelaksanaan Layanan PTSP; • Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Kompensasi; • Hasil pengawasan secara berkala oleh Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) periode bulan Oktober s.d Desember 2025; • Hasil monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) periode bulan Oktober s.d Desember 2025; • MoU atau Perjanjian Kerja Sama Layanan di Mall Pelayanan Publik dengan Pemerintah Daerah (jika ada); • Dokumen MoU Kerjasama dengan Lembaga Organisasi Penyandang Disabilitas; • Dokumentasi dan sertifikat pelatihan Petugas untuk memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas; • Dokumentasi Sosialisasi Buku Saku Panduan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; • Manfaat dan keberlanjutan inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2.	Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus 2. Pengadilan Negeri Malang Kelas IA 3. Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB 4. Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen/ Eviden Screenshoot Sinkronisasi Data Perkara Melalui MIS (http://url-aplikasi-mis/sinkronisasi) (format PDF) Screenshoot Sinkronisasi Data Perkara Melalui MIS dikirimkan dalam bentuk PDF yang hasil screenshoot dapat terbaca dengan jelas. Screenshoot dapat dibagi menjadi beberapa halaman dalam 1 PDF • Dokumen/Eviden Pelaksanaan monev per Bulan sesuai Surat Dirjen Badilum nomor 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tentang Akurasi dan pengendalian Mutu data SIPP (format Excel); • Dokumen/Eviden Kesesuaian Pencatatan denda, Subsidair, uang pengganti, denda tilang dan data keuangan lainnya antara SIPP dan Putusan (format PDF) per bulan dan telah di tandatangi Ketua Pengadilan dan Panitera; • Dokumen/Eviden Kesesuaian Pencatatan denda, Subsidair, uang pengganti/restitusi, denda tilang dan data keuangan lainnya antara SIPP dan Putusan (format Excel) per bulan.
3.	Role Model Pimpinan KPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus 2. Pengadilan Negeri Malang Kelas IA 3. Pengadilan Negeri Jombang Kelas IA 4. Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA 5. Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025 (Nilai Lkjip) • SK Role Model Pimpinan Pada Pengadilan Negeri Yang Dikerluarkan Oleh Pengadilan Tinggi • Perolehan Predikat pada Pengadilan Negeri: <ul style="list-style-type: none"> ○ WBK (jika ada) ○ WBBM (jika ada) ○ SMAP (jika ada, lampirkan nilai dan jenis predikat) • Dokumen Penghargaan yang diperoleh satker dibawah kepemimpinan calon role model, baik eksternal maupun internal pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

4.	Role Model Panitera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus 2. Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA 3. Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA 4. Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB 5. Pengadilan Negeri Kab. Madiun Kelas IB 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)
5.	Role Model Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus 2. Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA 3. Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA 4. Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA 5. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan dari pimpinan pengadilan bahwa yang bersangkutan berintegritas dan mempunyai jiwa kepemimpinan • Responsif terhadap kebijakan Lembaga dan Pimpinan (eviden sosialisasi dan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut) • Inovasi di bidang Kesekretariatan (laporan implementasi atau monitoring terhadap kegiatan baru yang mendukung program satuan kerja) • Kegiatan rapat berjenjang dan MoU dengan pihak eksternal • Penghargaan yang pernah diraih seperti Sertifikasi/WBK/ WBBM/SMAP/ KPPN/KPKNL atau kementerian/lembaga terkait • Surat pernyataan dari pimpinan kepada calon Role Model yang memenuhi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) Ber-AKHLAK • Surat pernyataan pimpinan cepat tanggap dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi

			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 01 dan DIPA 03 dengan bobot nilai 85 ke atas • dokumen tindak lanjut temuan BPKP dan APIP BAWAS • dokumen tindak lanjut penyelesaian LHE SAKIP pada tahun berjalan • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Anggaran (AKIP) pada tahun 2024 minimal mendapat katagori BB atau “Sangat Baik” (nilai 70 ke atas) • SK Pembangunan Zona Integritas dan SK Kelompok Kerja AMPUH • Bukti pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan seluruh ASN yang wajib lapor • dokumentasi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan bagi keadila • Laporan Keuangan dan Laporan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Tahun 2024 • surat pernyataan pimpinan Role Model yang menyatakan bahwa calon Role Model cakap dalam pengelolaan teknologi informasi di bidang Kesekretariatan
6	Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus 2. Pengadilan Negeri Malang Kelas IA 3. Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB 4. Pengadilan Negeri Magetan Kelas II 	<ul style="list-style-type: none"> • SK PPID; • Informasi Profile dan Pelayanan Dasar Pengadilan (berisi screenshot atau dokumen tentang informasi profil, prosedur beracara, biaya proses penyelesaian perkara dan agenda sidang); • Maklumat Informasi Publik telah ditetapkan dan dipublikasikan;

			<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Terkait Dengan Hak Masyarakat (berisi screenshot website atau dokumen tentang hak para pihak, hak pemohon, biaya perolehan salinan informasi, dsb); • Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan (berisi screenshot publikasi DIPA, LKJIP, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan di website); • Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi; • Informasi Lainnya (Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan, nilai tambah jika ada); • Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Website Pengadilan (screenshot publikasi IKM di website); • Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Website Pengadilan (screenshot publikasi IPAK di website); • Tautan ke Aplikasi SIPP dengan format http://sipp.pn-xxx.go.id yang dapat diakses dan menggunakan versi terbaru (versi 6.0.1); • Aksesibilitas Website Untuk Layanan Disabilitas (screenshot fitur pembantu disabilitas di website); • Standarisasi Menu dan Tampilan Website Pengadilan (screenshot menu dan tampilan website); • Daftar Informasi Publik (masukkan tautan ke halaman website yang menampilkan Daftar Informasi Publik); • Tautan ke Akun Sosial Media (dapat memasukkan linktree jika lebih dari satu media sosial yang aktif); • Informasi tentang Perkara (screenshot website yang menampilkan data statistik perkara); • Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian (Masukkan tautan ke aplikasi JDIH satuan kerja, yang dapat digunakan untuk mencari kebijakan dan keputusan Mahkamah Agung (seperti PERMA dan SK KMA) serta kebijakan dan keputusan satuan kerja terkait (seperti keputusan Ketua PT/PN)); • Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan; • Monitoring dan Evaluasi (laporan monitoring dan evaluasi PPID, meliputi permohonan informasi di PTSP, serta pengelolaan website dan media sosial).
--	--	--	--

Ketua,



Sujatmiko